

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

**Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

**Daftar Isi**

**Halaman**

**Surat Pernyataan Direksi**

**Laporan Auditor Independen**

**Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA  
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama         | : | Soegeng Hernowo  |
| Alamat Kantor   | : | GRHA PPI Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta   |
| Alamat Domisili | : | Jln. H. Tholib No. 1-B RT 002 RW 010, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| Nomor Telepon   | : | 021 386 2141-42  |
| Jabatan         | : | Direktur Utama   |
| 2. Nama         | : | Ira Berlianty Aziz   |
| Alamat Kantor   | : | GRHA PPI Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat , DKI Jakarta  |
| Alamat Domisili | : | Jln. Boulevard GDC Sektor Azalea, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat                    |
| Nomor Telepon   | : | 021 386 2141-42  |
| Jabatan         | : | Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL   |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP") di Indonesia:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Agustus 2025



Soegeng Hernowo  
Direktur Utama

Ira Berlianty Aziz  
Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL





RSM

# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor : 01187/2.1030/AU.2/12/1154-1/0/VIII/2025

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340  
F +62 215140 1350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi,  
**Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**  
**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Program”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Laporan keuangan Program tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00761/2.1133/AU.2/05/0259-1/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

### Tanggung Jawab Pengelola dan Tanggung Jawab Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Laporan Keuangan Program

Pengelola Program bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

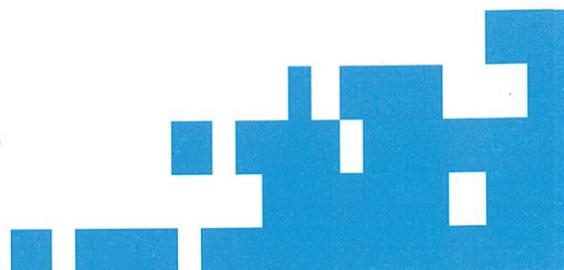
Dalam penyusunan laporan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi program atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, termasuk pelaporan keuangan program.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015  
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengeani independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**



**Dewi Novita Sari**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1154

Jakarta, 15 Agustus 2025



**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>Catatan</b>	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023*)</b> <b>Rp</b>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di bank	3	42.833.234	170.061.076
Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.184.536.240 dan Rp798.645.252)	4	49.614.067	715.746.446
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>92.447.301</b>	<b>885.807.522</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang kerja sama Program PUMK kepada BRI	5	1.421.558.639	1.166.553.602
Piutang kerja sama Program PUMK kepada mitra binaan - bersih (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.255.049 dan Nihil)	5	715.105.887	536.967.372
Aset tetap - bersih (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp27.041.750)	6	--	--
Piutang bermasalah - bersih (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.769.367.930 dan Rp2.799.155.430)	7	--	--
Aset lain-lain - bersih (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp431.586.192 dan Nihil)	8	--	431.586.192
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>2.136.664.526</b>	<b>2.135.107.166</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.229.111.827</b>	<b>3.020.914.688</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		--	--
<b>ASET NETO</b>			
Aset neto tidak terikat	9	2.229.111.827	3.020.914.688
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b>2.229.111.827</b>	<b>3.020.914.688</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>2.229.111.827</b>	<b>3.020.914.688</b>

\*) Direklasifikasi, lihat Catatan 13

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023*) Rp
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	10	25.502.800	44.740.053
Pendapatan bunga jasa giro	10	3.330.078	9.723.903
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>28.832.878</b>	<b>54.463.956</b>
<b>BEBAN (PENDAPATAN) OPERASIONAL</b>			
Beban penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang	11	819.944.729	(87.228.538)
Beban administrasi bank	11	691.010	1.969.577
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>820.635.739</b>	<b>(85.258.961)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>		<b>(791.802.861)</b>	<b>139.722.917</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<b>3.020.914.688</b>	<b>2.881.191.771</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>		<b>2.229.111.827</b>	<b>3.020.914.688</b>

\*) Direklasifikasi, lihat Catatan 13

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>Catatan</b>	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan		280.241.391	739.286.905
Pengembalian piutang bermasalah	7, 11	29.787.500	158.120.000
Pendapatan jasa administrasi piutang pinjaman	10	10.104.199	41.219.079
Pendapatan bunga jasa giro	10	3.330.078	9.723.903
Beban administrasi bank	11	(691.010)	(1.969.577)
Penyaluran dana PUMK kepada BRI	5	(450.000.000)	(1.000.000.000)
<b>KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>(127.227.842)</b>	<b>(53.619.690)</b>
<b>PENURUNAN NETO KAS DI BANK</b>		<b>(127.227.842)</b>	<b>(53.619.690)</b>
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>		<b>170.061.076</b>	<b>223.680.766</b>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>		<b>42.833.234</b>	<b>170.061.076</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 1. Umum

---

### a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (“Perusahaan”) merupakan hasil penggabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero), yang bergerak di bidang perdagangan ekspor, impor dan distribusi. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Pasal 34 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, Anggaran Dasar terakhir disahkan dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 12 tanggal 21 Maret 2024 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0060887.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024. Perubahan Anggaran Dasar terakhir ini adalah mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham.

Perusahaan melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha utama Perusahaan yaitu perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri yang mencakup ekspor, impor, antarpulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan dan juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan umum, industri bahan-bahan konstruksi, alat-alat kesehatan, *treatment* air limbah, pergudangan, penyedia akomodasi, penyedia makanan dan minuman, *real estate*, sewa guna dan laboratorium, jasa perdagangan, perdagangan besar farmasi, minyak dan gas serta produk turunannya. Selain itu, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yaitu sewa gedung, sewa gudang, sewa kantor, sewa ruko, sewa lahan, transportasi, properti, pariwisata dan melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

### Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4297).
- b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 117; Tambahan Lembaran Negara No. 4305).
- c. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-277/MBU/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Badan Usaha Milik Negara.
- e. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama Program PUMK”).

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- f. Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- g. Akta Penggabungan Perusahaan No. 3 tanggal 9 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H.
- h. Akta Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H.
- i. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. 5/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perusahaan telah membuat suatu kebijakan tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL).

Pusat dan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Unit TJSL Perusahaan) berlokasi di Kantor pusat Perusahaan di Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Utama**

**Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (“Program Pendanaan UMK” atau “Program PUMK”)**

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil, meliputi:

- a. Penyaluran dana pinjaman;
- b. Pembinaan, pendidikan promosi atau pameran; dan
- c. Pengawasan kegiatan usaha Mitra Binaan.

**Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Program TJSL Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang disahkan tanggal 3 Maret 2023. Program TJSL BUMN merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

Penyaluran program TJSL Perusahaan mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Program* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan sebagai berikut:

- 1. Tanpa Kemiskinan
- 2. Tanpa Kelaparan
- 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4. Pendidikan Berkualitas
- 5. Kesetaraan Gender
- 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7. Energi Bersih dan Terjangkau
- 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10. Berkurangnya Kesenjangan
- 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 14. Ekosistem Lautan
- 15. Ekosistem Daratan
- 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program TJSL Perusahaan dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program TJSL disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional Perusahaan.

**c. Sumber Dana**

**Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil**

Sumber dana untuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil berasal dari:

- a. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.

**Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersumber dari:

- a. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan No. 13/DU/SKD/PPI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, pengurus TJSL berada di bawah Kepala Sekretariat Perusahaan. Adapun struktur pengurus per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL	Agus Hartanto	Nabila
Manajer Humas, Kelembagaan dan TJSL	Muhammad Ikhsan	Muhammad Ikhsan
Asisten Manajer TJSL	Fadli Rosyad	Fadli Rosyad
Officer TJSL	Adityas Prastyo Legowo	Adityas Prastyo Legowo

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan**

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Unit TJSL adalah sebagai berikut:

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sehubungan dengan dicabutnya PSAK No. 45 tentang Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, selanjutnya penyajian laporan keuangan menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) tentang Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Berorientasi Nonlaba.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan keuangan Unit Program TJSI, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain.

Laporan Keuangan Unit Program TJSI, meliputi:

- 1) Laporan Posisi Keuangan  
Menyajikan informasi aset, liabilitas, dan aset neto Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil pada periode tertentu.
- 2) Laporan Aktivitas  
Menyajikan perubahan jumlah aset neto (aset neto tidak terikat) selama tahun-tahun tertentu yang mencakup organisasi secara keseluruhan. Kenaikan/penurunan aset neto tidak terikat pada tahun berjalan merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil selama tahun berjalan. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari aset neto pada tahun berjalan.
- 3) Laporan Arus Kas  
Menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil disusun dengan menggunakan metode langsung.
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan  
Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**b. Kas dan Bank**

Kas dan Bank adalah saldo kas dan saldo rekening bank Unit TJSI Perusahaan yang dapat dipergunakan secara tidak terbatas untuk membiayai kegiatan Unit TJSI Perusahaan yang terdapat di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

**c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh unit TJSI kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada Mitra Binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan.

Piutang kerja sama PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) merupakan penyaluran pendanaan usaha mikro dan kecil melalui BRI sebagai kerja sama PUMK. Kerja sama program PUMK ini memiliki fokus strategi jangka panjang pada pengembangan usaha mikro.

Pada tahun 2022, pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil kepada Mitra Binaan disalurkan secara kolaborasi melalui BRI sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian BUMN yang tertuang pada Surat Menteri BUMN No. 721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 (“S-721/2022”) perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama Program PUMK”). Pada saat perjanjian kerja sama telah selesai dilakukan, BRI akan mengembalikan saldo dana Program PUMK serta menyetorkan dana pengembalian dan jasa administrasi Program PUMK secara bertahap kepada BUMN Pembina. Berdasarkan Perjanjian No. 017/DU/PJ.12.2022 tanggal 16 Desember 2022 disebutkan bahwa jangka waktu kerja sama Program PUMK yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangannya perjanjian.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kualitas pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 dapat digolongkan dalam 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

**1) Lancar**

Dalam hal pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan porsi bagi hasil tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/atau porsi bagi hasil paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

**2) Kurang lancar**

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/atau porsi bagi hasil yang melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

**3) Diragukan**

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/atau porsi bagi hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah disetujui bersama.

**4) Macet**

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/atau porsi bagi hasil yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

**d. Penyisihan Penurunan Piutang Pinjaman**

Alokasi penyisihan penurunan piutang pinjaman ditetapkan berdasarkan evaluasi pengurus terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang pinjaman tersebut. Alokasi penyisihan penurunan piutang pinjaman ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan diakui pada saat akhir periode akuntansi dan diukur serta dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Dengan mempertimbangkan karakteristik PUMK, maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka persentase yang diperoleh untuk menghitung alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan Perusahaan adalah sebagai berikut:

**2024 dan 2023**

**Klasifikasi untuk Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman**

Lancar	0%
Kurang lancar	25%
Diragukan	75%
Macet	100%

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**e. Piutang Pinjaman Bermasalah – Bersih**

Piutang pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman yang besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah. Piutang bermasalah dengan penyisihan sebesar 100% ini diklasifikasikan sebagai aset lain-lain.

**f. Piutang Jasa Administrasi Pinjaman**

Piutang jasa administrasi merupakan piutang yang diakui atas pendapatan jasa administrasi yang dikenakan kepada Mitra Binaan sehubungan dengan penyaluran dana. Nilai piutang ini mencakup pendapatan jasa administrasi yang telah ditagihkan maupun yang masih dalam bentuk akrual pada akhir periode akuntansi.

**g. Aset tetap**

Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus sepanjang taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

<b>Jenis Aset</b>	<b>Tahun</b>
Kendaraan	8
Inventaris dan peralatan	4

**h. Pengakuan Penerimaan, Pendapatan, Penyaluran, Beban dan Pengeluaran**

Alokasi dana dari BUMN Pembina merupakan dana yang diperoleh dari BUMN Pembina yang diperuntukan untuk PUMK.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana PUMK yang disalurkan kepada Mitra Binaan. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual sebagai pendapatan bunga hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan lain-lain adalah penerimaan kembali yang diperoleh dari pengembalian PUMK atas pemulihan piutang bermasalah dan pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang. Penerimaan kembali diakui sebagai pendapatan pada saat pengembalian dana telah diterima.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro dan bunga deposito. Beban administrasi bank merupakan beban biaya bank dan beban pajak giro. Pendapatan jasa giro dan beban administrasi bank diakui secara akrual.

Beban diakui dalam Laporan Aktivitas pada periode dimana beban tersebut telah menjadi kewajiban TJS Perusahaan untuk dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan.

**i. Aset Neto**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

**j. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Unit TJS Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK ETAP tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, yang didefinisikan antara lain:

- a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;
- b. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas;

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat); dan
- d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

**k. Penilaian Kinerja**

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("PER-2") khususnya pada pasal 228 yang mencabut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, maka perhitungan efektivitas dan kolektibilitas sebagai penilaian kinerja PUMK sudah tidak berlaku.

**3. Kas di Bank**

	<b>2024</b> Rp	<b>2023</b> Rp
<b>Bank</b>		
Pihak Berelasi:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42.833.234	170.061.076
<b>Jumlah</b>	<b>42.833.234</b>	<b>170.061.076</b>

**4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Bersih**

- a. Rincian piutang pinjaman Mitra Binaan per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b> Rp	<b>2023</b> Rp
Perdagangan	694.087.516	847.483.783
Industri	283.915.584	322.014.878
Jasa	163.814.207	252.560.037
Perikanan	92.333.000	92.333.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.234.150.307</b>	<b>1.514.391.698</b>
Dikurangi :		
Penyisihan penurunan nilai piutang	(1.184.536.240)	(798.645.252)
<b>Jumlah</b>	<b>49.614.067</b>	<b>715.746.446</b>

- b. Rincian piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Mitra Binaan</b>	<b>Piutang Pinjaman</b>
Jawa Barat	31	660.231.974
DKI Jakarta	19	290.091.443
Banten	8	118.414.236
Jawa Timur	1	92.333.000
Jawa Tengah	6	73.079.654
<b>Sub Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>1.234.150.307</b>
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai piutang		(1.184.536.240)
<b>Jumlah</b>		<b>49.614.067</b>

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Provinsi	2023	
	Jumlah Mitra Binaan	Piutang Pinjaman
Jawa Barat	34	768.411.002
DKI Jakarta	22	393.630.138
Banten	11	165.525.212
Jawa Tengah	6	94.492.346
Jawa Timur	1	92.333.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>1.514.391.698</b>
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai piutang		(798.645.252)
<b>Jumlah</b>		<b>715.746.446</b>

c. Rincian piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas	2024			
	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan	Penyisihan	Bersih
Lancar	14.020.841	0%	--	14.020.841
Kurang lancar	47.457.635	25%	11.864.409	35.593.226
Diragukan	--	75%	--	--
Macet	1.172.671.831	100%	1.172.671.831	--
<b>Jumlah</b>	<b>1.234.150.307</b>		<b>1.184.536.240</b>	<b>49.614.067</b>

Kolektibilitas	2023			
	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan	Penyisihan	Bersih
Lancar	550.940.548	0%	--	550.940.548
Kurang lancar	203.046.830	25%	50.761.707	152.285.123
Diragukan	50.083.100	75%	37.562.325	12.520.775
Macet	710.321.220	100%	710.321.220	--
<b>Jumlah</b>	<b>1.514.391.698</b>		<b>798.645.252</b>	<b>715.746.446</b>

d. Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai:

	2024	2023
	Rp	Rp
Saldo awal		727.753.790
Penambahan penyisihan kerugian		
penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 11)	385.890.988	70.891.462
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.184.536.240</b>	<b>798.645.252</b>

Pengurus berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman Mitra Binaan di masa yang akan datang.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**5. Piutang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

a. Mutasi saldo piutang kerja sama Program PUMK kepada BRI:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Saldo awal	1.166.553.602	700.000.000
Penambahan		
Penyaluran dana PUMK kepada BRI	450.000.000	1.000.000.000
Pengembalian piutang mitra binaan diterima BRI	417.606.436	149.032.628
Piutang jasa administrasi kerja sama BRI	15.398.601	3.520.974
Pengurangan		
Penyaluran dana oleh BRI kepada mitra binaan	(628.000.000)	(686.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>1.421.558.639</b>	<b>1.166.553.602</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 ("PER-05/2021 dan PER-6/2022") dan PER-01/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, menyatakan bahwa:

- a) Kerja Sama PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.
- b) Mekanisme kerja sama tersebut di atas, dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kementerian BUMN merekomendasikan BRI kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola Kerja Sama PUMK melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 Tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama PUMK.

Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian BUMN, pada tanggal 19 Desember 2022 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan BRI tentang Pelaksanaan PUMK. Perusahaan melalui unit TJSI melakukan penyetoran dana PUMK ke BRI dengan jangka waktu lima 5 tahun sejak tahun 2022.

Berdasarkan Berita Acara Penyetoran Dana PUMK No. 11/BA/SPR/PPI/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan No. 13/BA/SPR/PPI/XI/ 2023 tanggal 16 November 2023, Perusahaan melakukan penyetoran dana kepada BRI pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp450.000.000 dan Rp1.000.000.000.

Melalui laporan yang dikirimkan oleh BRI dalam surat No. B.436-MBD/PDT/06/2025 dan No. B.210/MBD/01/2024, Perusahaan mengakui pendapatan jasa administrasi atas piutang kerja sama dengan BRI pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.398.601 dan Rp3.520.974.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Mutasi saldo piutang kerja sama Program PUMK kepada Mitra Binaan:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Saldo Awal	536.967.372	--
Penyaluran dana BRI kepada mitra binaan	628.000.000	686.000.000
Pengembalian piutang mitra binaan diterima BRI	(417.606.436)	(149.032.628)
<b>Total Piutang</b>	<b>747.360.936</b>	<b>536.967.372</b>
Akumulasi penyisihan piutang mitra binaan - kerja sama BRI	(32.255.049)	--
<b>Total Piutang Setelah Penyisihan</b>	<b>715.105.887</b>	<b>536.967.372</b>
Piutang atas akrual jasa administrasi	--	--
<b>Jumlah Piutang Mitra Binaan - Kerja Sama BRI</b>	<b>715.105.887</b>	<b>536.967.372</b>

c. Mutasi saldo akumulasi penyisihan piutang kerja sama Program PUMK kepada Mitra Binaan:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Saldo awal	--	--
Penambahan penyisihan penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 11)	32.255.049	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>32.255.049</b>	<b>--</b>

d. Rincian piutang – kerja sama PUMK kepada BRI berdasarkan kolektibilitas:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>2024</b>			
		<b>Tarif</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Bersih</b>
Lancar	705.221.998		0%	--	705.221.998
Kurang Lancar	2.470.600		25%	617.650	1.852.950
Diragukan	32.123.757		75%	24.092.818	8.030.939
Macet	7.544.581		100%	7.544.581	--
<b>Jumlah</b>	<b>747.360.936</b>		<b>32.255.049</b>		<b>715.105.887</b>

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>2023</b>			
		<b>Tarif</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Bersih</b>
Lancar	536.967.372		0%	--	536.967.372
Kurang Lancar	--		25%	--	--
Diragukan	--		75%	--	--
Macet	--		100%	--	--
<b>Jumlah</b>	<b>536.967.372</b>		<b>--</b>		<b>536.967.372</b>

Pada saat perjanjian kerja sama telah selesai dilakukan, BRI akan mengembalikan saldo dana PUMK yang dimiliki (dana cash) berikut jasa administrasinya serta menyertakan dana pengembalian PUMK secara bertahap kepada BUMN Pembina.

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 6. Aset Tetap

Saldo dan mutasi aset tetap tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Nilai Perolehan</b>				
Kendaraan	9.900.000	--	--	9.900.000
Inventaris dan peralatan	17.141.750	--	--	17.141.750
<b>Jumlah</b>	<b>27.041.750</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>27.041.750</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	(9.900.000)	--	--	(9.900.000)
Inventaris dan peralatan	(17.141.750)	--	--	(17.141.750)
<b>Jumlah</b>	<b>(27.041.750)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>(27.041.750)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>--</b>			<b>--</b>
	<b>2023</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Nilai Perolehan</b>				
Kendaraan	9.900.000	--	--	9.900.000
Inventaris dan peralatan	17.141.750	--	--	17.141.750
<b>Jumlah</b>	<b>27.041.750</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>27.041.750</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	(9.900.000)	--	--	(9.900.000)
Inventaris dan peralatan	(17.141.750)	--	--	(17.141.750)
<b>Jumlah</b>	<b>(27.041.750)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>(27.041.750)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>--</b>			<b>--</b>

## 7. Piutang bermasalah

Saldo piutang bermasalah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Piutang bermasalah	2.769.367.930	2.799.155.430
Dikurangi		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	(2.769.367.930)	(2.799.155.430)
<b>Piutang Bermasalah - Bersih</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi serta penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
<b>Piutang Bermasalah</b>		
Perdagangan	1.000.556.756	1.013.906.756
Industri	709.104.449	710.541.949
Jasa	295.925.370	310.925.370
Lainnya	763.781.355	763.781.355
<b>Jumlah</b>	<b>2.769.367.930</b>	<b>2.799.155.430</b>
<b>Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang</b>		
Perdagangan	(1.000.556.756)	(1.013.906.756)
Industri	(709.104.449)	(710.541.949)
Jasa	(295.925.370)	(310.925.370)
Lainnya	(763.781.355)	(763.781.355)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.769.367.930)</b>	<b>(2.799.155.430)</b>
<b>Piutang Bermasalah - Bersih</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Saldo awal	2.799.155.430	2.957.275.430
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah (Catatan 11)	(29.787.500)	(158.120.000)
<b>Saldo akhir</b>	<b>2.769.367.930</b>	<b>2.799.155.430</b>

Penyesuaian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah tidak memberikan dampak pada laporan aktivitas tahun berjalan karena Pengurus telah melakukan pembebanan atas penyisihan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Piutang pinjaman bermasalah merupakan saldo piutang pinjaman dari 159 Mitra Binaan (tidak diaudit) pada PUMK yang masih terbuka (*outstanding*). Piutang pinjaman bermasalah merupakan reklasifikasi dari piutang macet yang penyalurannya dilakukan sampai dengan tahun 2019.

## 8. Aset Lain - Lain

Aset lain-lain merupakan piutang kepada Perusahaan yang terdiri dari piutang Ex-PT Banda Graha Reksa dan Ex-PT Cipta Niaga dengan rincian sebagai berikut ini:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Piutang ex-PT Cipta Niaga	395.283.007	395.283.007
Piutang ex-PT Banda Ghara Reksa	36.303.185	36.303.185
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai aset lain-lain	(431.586.192)	--
<b>Aset lain-lain - bersih</b>	<b>--</b>	<b>431.586.192</b>

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi penyisihan penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Saldo awal	--	--
Penambahan penyisihan penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 11)	431.586.192	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>431.586.192</b>	--

## 9. Aset Neto

Aset neto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Saldo awal	3.020.914.688	2.881.191.771
Kenaikan (penurunan) aset neto	(791.802.861)	139.722.917
<b>Saldo akhir</b>	<b>2.229.111.827</b>	<b>3.020.914.688</b>

## 10. Pendapatan

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Pendapatan jasa administrasi pinjaman mitra binaan	10.104.199	41.219.079
Pendapatan jasa administrasi pinjaman mitra binaan - kerja sama BRI	15.398.601	3.520.974
<b>Sub jumlah pendapatan jasa administrasi pinjaman</b>	<b>25.502.800</b>	<b>44.740.053</b>
Pendapatan bunga jasa giro	3.330.078	9.723.903
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>28.832.878</b>	<b>54.463.956</b>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diperuntukkan sebagai sumber pendanaan PUMK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Adapun distribusi atau komposisi jasa administrasi untuk penyaluran dana PUMK baru ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun.

## 11. Beban (Pendapatan) Operasional

Beban PUMK meliputi beban penyisihan (pemulihan) piutang dan beban administrasi umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
Beban penyisihan penurunan nilai aset lain-lain (Catatan 8)	431.586.192	--
Beban penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan (Catatan 4) (Pemulihan) nilai piutang mitra binaan (Catatan 7)	385.890.988 (29.787.500)	70.891.462 (158.120.000)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan - kerja sama BRI (Catatan 5)	32.255.049	--
<b>Sub jumlah beban penyisihan penurunan nilai piutang</b>	<b>819.944.729</b>	<b>(87.228.538)</b>
Beban administrasi bank	691.010	1.969.577
<b>Jumlah beban</b>	<b>820.635.739</b>	<b>(85.258.961)</b>

## 12. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi:

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Jenis Hubungan</b>	<b>Unsur Transaksi Pihak Berelasi</b>
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Alokasi dana dari BUMN Pembina
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang kerja sama PUMK
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana, pendapatan jasa giro dan beban administrasi bank

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi:

	<b>2024</b> <b>Rp</b>	<b>2023</b> <b>Rp</b>
<b>Aset</b>		
Kas di bank	42.833.234	170.061.076
Piutang kerja sama PUMK kepada BRI	1.421.558.639	1.166.553.602
Piutang PUMK kepada mitra binaan - kerja sama BRI	<u>715.105.887</u>	536.967.372
<b>Jumlah</b>	<b>2.179.497.760</b>	<b>1.873.582.050</b>
Presentase jumlah aset kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>97,77%</u>	<u>62,02%</u>
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan jasa giro	3.330.078	9.723.903
Presentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	<u>11,55%</u>	<u>17,85%</u>
<b>Beban</b>		
Beban administrasi bank	691.010	1.969.577
Presentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	<u>0,08%</u>	<u>2,31%</u>

**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

### 13. Reklasifikasi

Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas tanggal 31 Desember 2023 telah diklasifikasikan ulang sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang kerja sama Program PUMK kepada BRI	--	1.166.553.602	1.166.553.602
Piutang kerja sama Program PUMK kepada mitra binaan	--	536.967.372	536.967.372
Piutang kerja sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui BRI	1.703.520.974	(1.703.520.974)	--
Piutang bermasalah sektor perdagangan	1.751.532.044	(737.625.288)	1.013.906.756
Penyisihan piutang bermasalah sektor perdagangan	(1.751.532.044)	737.625.288	(1.013.906.756)
Piutang bermasalah sektor lain-lain	26.156.067	737.625.288	763.781.355
Penyisihan piutang bermasalah sektor lain-lain	(26.156.067)	(737.625.288)	(763.781.355)
<b>Subjumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.703.520.974</b>	--	<b>1.703.520.974</b>
<b>LAPORAN AKTIVITAS</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan	17.094.075	(17.094.075)	--
Pendapatan pemulihan piutang bermasalah	158.120.000	(158.120.000)	--
<b>Subjumlah Pendapatan</b>	<b>175.214.075</b>	<b>(175.214.075)</b>	--
<b>Beban</b>			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan	(87.985.537)	17.094.075	(70.891.462)
Beban penyisihan (pemulihan) penurunan piutang	--	158.120.000	158.120.000
<b>Subjumlah Beban</b>	<b>(87.985.537)</b>	<b>175.214.075</b>	<b>87.228.538</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.790.749.512</b>	--	<b>1.790.749.512</b>

### 14. Standar Akuntansi Keuangan Baru yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Pada 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (“SAK EP”) yang merupakan hasil adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif pada 2025 dan diizinkan untuk diterapkan lebih awal. SAK EP akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“ETAP”).

Pada saat penerbitan laporan keuangan PUMK, Pengurus masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan PUMK.

### 15. Tanggung Jawab atas Penyusunan Laporan Keuangan

Pengelola laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi oleh Pengurus untuk terbit pada tanggal 15 Agustus 2025.